

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 63 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
ETALASE PRODUK JASA KEBERSIHAN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Jasa Kebersihan, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Kebersihan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK JASA KEBERSIHAN.
- KESATU : Menetapkan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022

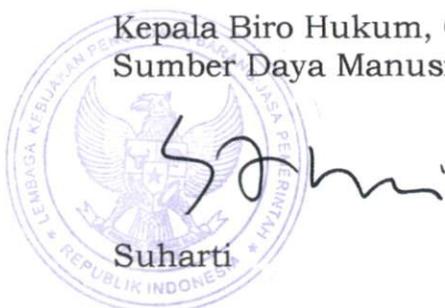
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN HASIL  
TELAHAAN PRODUK KATALOG  
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK JASA  
KEBERSIHAN

NOMOR : 63 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 MARET 2022

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Keberadaan jasa kebersihan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan higienis untuk dapat mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan operasional Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) di seluruh Indonesia. Kebutuhan terhadap jasa kebersihan termasuk dalam kebutuhan rutin dan berulang setiap tahun. Untuk pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan secara transparan dan tepat waktu, maka dipandang perlu untuk mencantumkan jasa kebersihan ke dalam Katalog Elektronik.

Selain itu, untuk mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor: 01 Tahun 2020, Nomor: 115/M.PPN/HK/12/2020, Nomor: 356-4666 Tahun 2020, Nomor: 7 Tahun 2020, dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, yang salah satu aksinya adalah implementasi *e-payment* dan *e-katalog*, dengan salah satu *output* bertambahnya pembelanjaan pada 5 (lima) komoditas sesuai kriteria yang telah ditayangkan di katalog lokal di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Penetapan 5 (lima) komoditas dalam Surat Keputusan Bersama di atas salah satunya adalah Jasa Kebersihan.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan rutin terhadap Jasa Kebersihan di lingkungan K/L/PD serta mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Kebersihan.

Selanjutnya, keputusan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Jasa Kebersihan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Jasa Kebersihan
  
2. Latar Belakang Usulan :
  - Amanat Peraturan Perundang-undangan
  - Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
  - Kebutuhan dari K/L/PD terhadap barang/jasa
  - Kebutuhan berdasarkan fitur Iklan Katalog
  - Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
  
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Jasa Kebersihan untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi.

Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Verifikator

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk pada Telaahan ini diverifikasi oleh Verifikator pada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

## BAB II

### PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

- A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog):  
Badan Usaha Penyedia Jasa Kebersihan
- B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud huruf A harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - a) KBLI No. 81210 (Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan);
    - b) KBLI No. 81300 (Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman);
    - c) KBLI No. 81290 (Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya); atau
    - d) Bidang lainnya yang sejenis.
  2. Mempunyai status *valid* keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
  3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa di wilayah Pengelola Katalog Elektronik.
  4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
    - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
    - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
    - d) Kartu Tanda Penduduk.
  5. Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- C. Syarat Teknis
1. Memiliki metode pelaksanaan pekerjaan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik.
  2. Personel yang ditawarkan sudah termasuk seragam kerja dan peralatan kerja (apabila ditawarkan).
  3. Spesifikasi Personel:
    - a) Kliner *Junior*  
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kliner *Junior* yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku.
    - b) Kliner Spesialis  
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kliner Spesialis yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.
    - c) Kliner Senior  
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kliner Senior yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.

- d) *Team Leader*  
Memiliki Sertifikat Kompetensi *Team Leader* yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.
- e) *Asisten Supervisor*  
Memiliki Sertifikat Kompetensi *Asisten Supervisor* yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.
- f) *Supervisor*  
Memiliki Sertifikat Kompetensi *Supervisor* yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.
- g) *Koordinator*  
Memiliki Sertifikat Kompetensi *Koordinator* yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.
- h) *Quality Control*  
Memiliki Sertifikat Kompetensi *Quality Control* yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku.

D. Syarat Harga

1. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
2. Komponen Biaya pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - a) Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
  - b) Tunjangan Hari Raya (THR);
  - c) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
  - d) BPJS Ketenagakerjaan;
  - e) Biaya Peralatan Kerja Kebersihan (apabila ditawarkan);
  - f) Biaya Seragam Kerja;
  - g) *Management Fee*; dan
  - h) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PROFIL PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi ongkos kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

#### A. Kategori Produk

No.	Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori 1
1	Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan Perkantoran	<i>Kliner Junior</i>
			<i>Kliner Spesialis</i>
			<i>Kliner Senior</i>
			<i>Team Leader</i>
			<i>Asisten Supervisor</i>
			<i>Supervisor</i>
			<i>Koordinator</i>
			<i>Quality Control</i>

#### B. Atribut Produk

Sub Kategori 1 *Kliner Junior*, *Kliner Spesialis*, *Kliner Senior*, *Team Leader*, *Asisten Supervisor*, *Supervisor*, *Koordinator* dan *Quality Control* memiliki rincian atribut sebagai berikut:

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
7. Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%);
8. Masa berlaku produk (masa berlaku sertifikat kompetensi);
9. Sertifikat Kompetensi;
10. Pendidikan;
11. Umur;
12. Komponen Biaya;
13. Perlengkapan Kerja Kebersihan (apabila ditawarkan);
14. Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun; dan
15. Keterangan lainnya.

#### C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

#### D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya  
 Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam 1 (satu) surat pesanan)  
 Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam 1 (satu) surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada kesempatan selanjutnya.
2. Calon Penyedia dapat menawar untuk seluruh atau sebagian sub kategori 1 produk (Kliner *Junior*, Kliner Spesialis, Kliner Senior, *Team Leader*, Asisten *Supervisor*, *Supervisor*, Koordinator dan/atau *Quality Control*).
3. Harga tayang merupakan harga satuan tertinggi, minimal terdiri dari:
  - a) Gaji minimal UMK;
  - b) THR;
  - c) BPJS Kesehatan;
  - d) BPJS Ketenagakerjaan;
  - e) Biaya Peralatan Kerja Kebersihan (apabila ditawarkan);
  - f) Biaya Seragam Kerja;
  - g) *Management Fee*; dan
  - h) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, maka wajib didaftarkan terlebih dahulu; atau 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan pilihan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang ditawarkan oleh Penyedia
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk ( <b>orang per bulan</b> )
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
7	Nilai TKDN (%)	Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk (memiliki TKDN atau tidak). Apabila produk memiliki TKDN, maka dapat dilakukan pencarian nomor sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk memunculkan nilai TKDN produk pada Katalog Elektronik
8	Masa berlaku produk (masa berlaku sertifikat kompetensi)	Wajib diisi	Berisi informasi masa berlaku Sertifikat Kompetensi
9	Sertifikasi Kompetensi	Wajib diisi	Berisi informasi nomor sertifikat kompetensi yang dimiliki personel (Sertifikat Kompetensi Kliner <i>Junior</i> /Kliner Spesialis/Kliner Senior/ <i>Team Leader</i> /Asisten

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			<i>Supervisor/ Supervisor/ Koordinator / Quality Control)</i>
10	Pendidikan	Wajib diisi	Berisi informasi pendidikan terakhir personel
11	Umur	Wajib diisi	Berisi informasi umur personel
12	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal terdiri dari: a) Gaji minimal UMK; b) THR; c) BPJS Kesehatan; d) BPJS Ketenagakerjaan; e) Biaya Peralatan Kerja Kebersihan (apabila ditawarkan); f) <i>Management Fee</i> ; dan g) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13	Perlengkapan Kerja Kebersihan (apabila ditawarkan)	Tidak wajib diisi	Berisi informasi perlengkapan kerja yang melekat pada masing-masing personel (apabila ditawarkan)
14	Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun	Wajib diisi	Berisi informasi jumlah setelan seragam kerja per tahun
15	Keterangan lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN HASIL  
TELAHAAN PRODUK KATALOG  
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK JASA  
KEBERSIHAN  
NOMOR : 63 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 MARET 2022

Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN  
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_[nama wakil sah badan usaha]  
Nomor Identitas : \_\_\_\_\_[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan  
dan atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

1. PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ bertanggung jawab atas informasi melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).

9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] [bulan] 20\_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-  
dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)*

*[jabatan dalam badan usaha]*

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO